

SKRIPSI

KUMALA HAPPY HERWIYANTI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN
PENGGUNA JASA ANGKUTAN DARAT TRAVEL**



**MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2003**

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PENGGUNA JASA ANGKUTAN DARAT TRAVEL

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing,



Sri Handajani, S.H., M.Hum.
NIP. 130 809 069

Penyusun,



Kumala Happy Herwiyanti
NIM. 039914788

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2003**



**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji
Pada tanggal 23 Mei 2003**

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : Yohanes Sogar Simamora, S.H., M.Hum.

Anggota : 1. Sri Handajani, S.H., M.Hum.

2. Trisadini Prasastina Usanti, S.H., M.H.

BAB IV**PENUTUP****1. KESIMPULAN**

- a. Bahwa perjanjian pengangkutan travel terbentuk sejak terjadinya kesepakatan antara penumpang/ pengirim barang dengan pengangkut travel yang ditandai dengan adanya tiket penumpang atau dokumen angkutan. Dengan adanya perjanjian pengangkutan tersebut, maka lahirlah hubungan hukum pengangkutan, menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Namun, seringkali hak dan kewajiban yang dicantumkan itu tidak seimbang atau berat sebelah, sehingga merugikan salah satu pihak.
- b. Bahwa terdapat sejumlah prestasi/ kewajiban bagi para pihak dalam perjanjian pengangkutan travel yang harus dipenuhi secara bertanggung-jawab. Jika terjadi pelanggaran oleh pihak pengangkut travel yang mengakibatkan kerugian pada penumpang/ pengirim barang, maka pihak yang dirugikan tersebut dapat menuntut pembayaran ganti rugi kepada pihak pengangkut travel. Upaya penyelesaian sengketa dapat

ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Dasar gugatan yang bisa digunakan di pengadilan adalah berdasarkan wanprestasi atau perbuatan melanggar hukum. Sedangkan diluar pengadilan dapat dilakukan dengan perdamaian atau melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Akan tetapi keberadaan BPSK yang hanya dibentuk di kota-kota tertentu menyebabkan banyak pihak masih tetap menggunakan jalur pengadilan.

2. SARAN

- a. Perlunya pengaturan mengenai tata cara pembuatan perjanjian standar dalam hal ini menyangkut klausula baku yang tertuang didalamnya. Hal ini dilakukan agar klausula baku dalam perjanjian standar tidak mengandung klausula eksonerasi yang menyebabkan tidak seimbangnya hak dan kewajiban para pihak. Dalam UUPK belum ditemukan istilah klausula eksonerasi, yang ada hanya klausula baku.
- b. - Perlu adanya peningkatan terhadap keberadaan BPSK yang saat ini hanya dibentuk di kota-kota tertentu saja. BPSK setidaknya harus ada di tiap-tiap propinsi agar

sengketa-sengketa konsumen dapat diselesaikan melalui BPSK dan bukan lagi melalui pengadilan.

- Perlu dilakukan tindakan untuk memasyarakatkan penggunaan BPSK sebagai suatu upaya penyelesaian sengketa konsumen.
- Perlu ditingkatkannya kepastian hukum dalam kasus-kasus yang ditangani oleh BPSK. Kasus seperti apa dan bagaimana yang dapat diselesaikan oleh BPSK . Apakah kasus tersebut harus berdasarkan nilai / tingkat kerugian (berat / ringannya suatu kasus), atau apakah kasus tersebut merupakan kasus yang kerugiannya menimbulkan kematian.